



Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022

Puspita Geatri Br Perangin-Angin¹⁾Erisma Adi Natalian²⁾Risma Wira Bharata³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Tidar

Email : ¹⁾puspitageatri29@gmail.com ²⁾erismaadinatalian23@gmail.com

³⁾rismawirab@gmail.com

***Abstract** By doing this research aims to examine the financial performance of the local government of Central Java Province. This analysis uses regional financial independence ratios, financial efficiency ratios, PAD effectiveness ratios, and growth ratios to assess financial performance. This study is included in the category of quantitative descriptive research. The data used comes from the Financial Report of the Central Java Provincial Government for the 2019-2022 budget period. Financial ratio analysis is the method used to perform this analysis. As shown by the research results, the financial performance of the Central Java Provincial Government is still far from optimal. Regional Original Revenue Management has proven successful, but regional finances are still inefficient. In addition, the level of regional independence is still low, as shown by the increase in central government assistance compared to the regional original income of Central Java Province.*

***Keywords:** Regional financial independence ratio, regional financial efficiency ratio, PAD effectiveness ratio, growth ratio.*

Abstrak Dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Analisis ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio pertumbuhan untuk menilai kinerja keuangan. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode anggaran 2019-2022. Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk melakukan analisis ini. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih jauh dari optimal. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah telah terbukti berhasil, tetapi keuangan daerah masih kurang efisien. Selain itu, tingkat kemandirian daerah juga masih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan bantuan pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan.

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sector publik terutama di Indonesia saat ini kian pesat dengan hadirnya era terbaru dalam menjalankan manajemen keuangan daerah. Tergantung pada manajemen keuangan dilakukan, pengelola keuangan daerah memperoleh dampak yang signifikan menyangkut keadaan daerah, mereka dapat lebih kuat dan berkuasa akan menjadikan tidak berdaya yang bergantung pada prosedur pengelolaan keuangannya.

Received April 30, 2023; Revised Mei 20, 2023; Juni 20, 2023

* Puspita Geatri Br Perangin-Angin, puspitageatri29@gmail.com

Dengan adanya antusiasme masyarakat untuk mengetahui pengelolaan keuangan di pemerintah daerah, maka dapat menimbulkan suatu tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 otonomi daerah memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengelola serta mengatur kegiatan pemerintah dan kepentingan publik sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Otonomi daerah telah memberi suatu pengaruh kinerja keuangan daerah dimana seluruh kegiatan pemerintah daerah mempunyai perencanaan secara efektif untuk mendukung perekonomian daerah.

Otonomi daerah memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan, sebagai suatu daerah yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah, pemerintah daerah harus mengelolanya dengan baik. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau publik dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Dalam hal penggunaan dana masyarakat, pemerintah daerah harus menunjukkan akuntabilitas. APBD adalah laporan keuangan pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu, yang menggambarkan tentang kapabilitas pemerintah untuk melakukan tanggung jawabnya. Pelaporan keuangan daerah memiliki tujuan untuk memberikan keterbukaan dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Tidak lain, pelaporan ini digunakan sebagai sumber evaluasi kinerja daerah. Rasio keuangan pemerintah daerah memungkinkan untuk mengevaluasi kinerja dan kemampuan pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangannya.

Dengan adanya deskripsi diatas, peneliti mengkaji bagaimana kinerja pemerintah daerah terkait dengan pengeloaan keuangan daerah. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis perkembangan pengelolaan kerja keuangan daerah dari periode ke periode. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji "Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah". Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kinerja keuangan daerah, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2019-2020, yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan seperti rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil dari program dan kegiatan yang telah atau akan dilakukan melalui pelaksanaan anggaran daerah, yang bisa diukur dengan cara yang jelas mengenai jumlah dan kualitasnya. Dalam hal ini, penilaian dapat dilakukan melalui tingkat efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010).

Menurut Pramono (2014), penilaian kinerja keuangan adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai suatu objek melalui alat ukur yang paten dengan menggunakan unit angka yang sesuai. Analisis rasio keuangan daerah yaitu sebuah metode dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Hal ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerahnya. Tidak hanya dapat menunjukkan bagaimana dana publik digunakan, akan tetapi juga dapat menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Analisis Rasio Keuangan

Menurut Abdul Halim (2004), analisis rasio keuangan merupakan upaya untuk mengetahui karakteristik keuangan daerah sesuai dengan laporan pengelolaan keuangan yang ada. Analisis keuangan yang sesuai dengan APBD dilakukan dengan menghitung dan membandingkan hasil dari beberapa tahun.

Analisis rasio keuangan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sudah ditentukan dan dilaksanakan merupakan metode untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan yaitu analisis rasio keuangan yang dipakai dalam melakukan peneliti ini.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dan mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan bantuan masyarakat dengan menggunakan sumber pajak dan retribusi adalah apa yang disebut kemandirian keuangan daerah. Kapasitas ini diukur dengan membandingkan PAD dengan sumber pendapatan lainnya, seperti pinjaman daerah dan bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Untuk menghitung Rasio Kemandirian, Anda dapat menggunakan rumus berikut.

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan luar, begitupun sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah meningkat

seiring dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah; semakin tinggi rasio ini, semakin banyak upaya masyarakat untuk terlibat dalam pembayaran retribusi dan pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan daerah. Tingkat pembayaran pajak dan retribusi digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel berikut dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan pola hubungan antara kemampuan daerah dari sisi keuangan :

Table 1. Pola Hubungan dan Tingkat kemampuan Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Rendah Sekali | 0% - 25% | Instruktif |
| Rendah | 25% - 50% | Konsultatif |
| Sedang | 50% - 75% | Partisipatif |
| Tinggi | 75% - 100% | Delegatif |

Sumber: Halim, 2001

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan rasio yang dapat mengukur perbandingan antara jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya diterima (Ulum,2009,31). Jika nilai risiko kurang dari satu (1) atau di bawah 100%, kinerja keuangan pemerintah daerah sehubungan dengan pendapatan yang diterima dan dihasilkan dianggap efisien.. Semakin rendah rasio efisiensi keuangan daerah, semakin bagus kinerja keuangan pemerintahnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menghitung biaya yang dikeluarkan dengan teliti pada saat melakukan pemungutan pendapatan seluruh pendapatan untuk menentukan apakah proses itu efektif atau tidak. Untuk menghitung rasio efisiensi,rumus yang digunakan antara lain :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

| Persentase Efisiensi | Kriteria Efisiensi |
|----------------------|--------------------|
| >100% | Tidak Efisien |
| 100% | Efisien Berimbang |
| <100% | Efisien |

Sumber: Mahsun, 2012

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan dalam menilai ukuran pemerintah daerah untuk melaksanakan pencapaian PAD sesuai anggaran yang sudah ditetapkan dan kemudian membandingkannya dengan target yang ditetapkan (Halim, 2010).

Cara menghitung rasio efektivitas yaitu melalui perbandingan antara PAD yang telah diterima dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menghitung rasio efektivitas, rumus berikut digunakan:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Table 3. Kriteria Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan

| Persentase Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|------------------------|----------------------|
| >100% | Tidak Efektif |
| 100% | Efektif Berimbang |
| <100% | Efektif |

Sumber: Mahsun, 2012

4. Rasio Pertumbuhan

Kapasitas pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi dari tahun ke tahun diukur dengan rasio pertumbuhan.. Rasio ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai apakah pendapatan atau belanja pemerintah daerah dalam tahun anggaran tersebut mengalami pertumbuhan yang positif atau negative (Mahmudi,2010). Pengukuran rasio pertumbuhan memiliki tujuan untuk menentukan perbandingan penerimaan dan pengeluaran maka dapat mengevaluasi mana yang perlu mendapat prioritas lebih lanjut. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Pertumbuhan:

1. Rasio Pertumbuhan PAD

$$\text{PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p-1}{\text{PAD tahun } p-1} \times 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{Pendapatan tahun } p-1}{\text{Pendapatan tahun } p-1} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan Belanja

$$\text{Belanja} = \frac{\text{Belanja tahun } p - \text{Belanja tahun } p-1}{\text{Belanja tahun } p-1} \times 100\%$$

(Keterangan : Th = Tahun, p = tahun yang dihitung, p-1 = tahun sebelumnya)

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang menggunakan perhitungan data keuangan. Dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan, rasio

efektivitas PAD, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menyelidiki kinerja keuangan pemerintah provinsi Jawa Tengah..

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk objek penelitiannya yaitu Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah 2019-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Laporan realisasi keuangan APBD pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari situs web resmi Kementerian Keuangan..

Teknik Analisis Data

Untuk memecahkan masalah penelitian ini, teknik analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk melakukan perhitungan data keuangan. Berikut adalah beberapa tolak ukur yang digunakan dalam teknik analisis ini:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
3. Rasio Efektivitas PAD
4. Rasio Pertumbuhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyek Penelitian Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah berada dibagian tengah Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah berada diantara 5040' hingga 8030' Lintang Selatan dan 108030' hingga 111030' Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Jawa Timur di timur, Jawa Barat di barat, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di selatan, dan Laut jawa di utara. Luasnya mencapai 3,25 juta ha, yang merupakan sekitar 25,04 % dari luas Pulau Jawa dan 1,70 % Indonesia secara keseluruhan.

Jawa Tengah adalah provinsi yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan total 573 kecamatan dengan 7.809 Desa dan 769 kelurahan. Kabupaten terbesar di Jawa Tengah adalah Cilacap, yang memiliki luas sekitar 213.851 ha, atau sekitar 6,57 persen dari seluruh Jawa Tengah. Kota terbesar di provinsi ini adalah Semarang, dengan luas sekitar 37.367 ha, atau sekitar 1,15 persen dari seluruh Jawa Tengah. Kota terkecil di provinsi ini adalah Magelang, dengan luas sekitar 1.812 ha, atau 0,06 persen dari seluruh Jawa Tengah..

Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian dapat mengindikasikan seberapa besar suatu daerah mampu dalam pembiayaan aktivitas pemerintahannya sendiri, pembangunan, serta pemberian bantuan kepada masyarakat dengan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan rasio ini.

Tabel 4. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022

| Tahun | PAD (dalam miliar rupiah) | Bantuan Pemerintah Pusat (dalam miliar rupiah) | RKKD (%) | Kemampuan Keuangan | Pola Hubungan |
|-------|---------------------------------|--|-------------|-----------------------|------------------|
| 2019 | 28.648,04 | 67.543,19 | 42,41 | Rendah | Konsultif |
| 2020 | 28.056,37 | 64.983,90 | 43,17 | Rendah | Konsultif |
| 2021 | 31.611,20 | 65.891,80 | 47,97 | Rendah | Konsultif |
| 2022 | 33.506,81 | 63.475,29 | 52,78 | Sedang | Partisipatif |

Sumber : Data Olahan

Rasio kemandirian keuangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai rata-rata 46,58% selama empat tahun, yang menempatkannya dalam kategori rendah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil terhadap total pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap bergantung pada pemerintah pusat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menunjukkan seberapa besar pengeluaran untuk menerima pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang sebenarnya diterima. Hasil perhitungan rasio ini dapat ditemukan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022

| Tahun | Belanja Daerah (dalam miliar rupiah) | Pendapatan Daerah (dalam miliar rupiah) | REKD (%) | Kriteria |
|-------|---|--|-------------|-------------------|
| 2019 | 106.293,66 | 106.022,90 | 100 | Efisien Berimbang |
| 2020 | 101.430,17 | 102.601,75 | 98,85 | Efisien |
| 2021 | 103.814,45 | 107.408,98 | 96,65 | Efisien |
| 2022 | 107.046,56 | 104.455,13 | 102,48 | Tidak Efisien |

Sumber : Data Olahan

Rasio efisiensi pada tahun 2019 sebesar 100%, 2020 sebesar 98,85%, 2021 sebesar 96,65%, dan 2022 sebesar 102,48%, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5.

Perhitungan rasio ini pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk periode anggaran 2019–2022 menunjukkan kategori kurang efisien, dengan menghasilkan pencapaian rata-rata 99,49%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi kurang efisien dalam mengumpulkan PAD, seperti yang ditunjukkan oleh tren rasio di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk memperoleh hasil yang optimal.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini mengindikasikan kapabilitas PemDa (pemerintah daerah) untuk mengumpulkan penerimaan PAD yang setara dengan target yang ditetapkan (Mahmudi, 2010). Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD dapat ditemukan dalam Tabel 6.

Tabel 6 Penghitungan Rasio Efektifitas PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022

| Tahun | Realisasi PAD (dalam miliar rupiah) | Anggaran PAD (dalam miliar rupiah) | Efektivitas PAD (%) | Kriteria |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------|
| 2019 | 28.648,04 | 27.422,03 | 104,47 | Efektif |
| 2020 | 28.056,37 | 30.866,98 | 90,89 | Tidak Efektif |
| 2021 | 31.611,20 | 29.538,30 | 107,01 | Efektif |
| 2022 | 33.506,81 | 32.699,21 | 102,46 | Efektif |

Dumber : Data Olahan

Tabel 6 menampilkan perkembangan rasio efektivitas Provinsi Jawa Tengah yang memadai, dengan rata-rata hasil sebesar 101,20% selama periode tahun anggaran 2019-2022. Pada tahun 2019, rasio efektivitas mencapai 104,47%, di mana realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menurun menjadi 90,89% pada tahun 2020, di mana realisasi penerimaan tidak mampu melampaui target. Namun, pada tahun 2021, rasio efektivitas meningkat menjadi 107,01 persen, dan realisasi penerimaan melampaui target. Rasio efektivitas juga menurun menjadi 102,46% pada tahun 2022, tetapi realisasi penerimaan tetap melampaui target. Meskipun penerimaan yang menurun, namun hasil rata-rata rasio efektifitas menunjukkan kategori Efektif.

4. Rasio Pertumbuhan

Dari waktu ke waktu, pemerintah daerah dapat mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya, seperti yang ditunjukkan oleh rasio pertumbuhan. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat ditemukan dalam Tabel 7.

Tabel 7 Penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, Pendapatan, dan Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022

| Tahun | Rasio Pertumbuhan PAD (%) | Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%) | Rasio pertumbuhan Belanja (%) |
|-------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 2020 | 2,06 | 3,22 | 4,57 |
| 2021 | 12,67 | 4,68 | 2,35 |
| 2022 | 5,99 | 2,75 | 3,11 |

Sumber : Data Olahan

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang berbeda-beda selama beberapa tahun. Tahun 2020, pertumbuhan PAD mengalami penurunan sebesar -2,06%. Tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan sebesar 12,67%. Namun, tahun 2022 pertumbuhan PAD kembali mengalami penurunan menjadi 5,99%.

Sementara itu, rasio pertumbuhan Pendapatan menunjukkan perubahan yang bervariasi dari tahun ke tahun berikutnya. Tahun 2020, rasio pertumbuhan mencapai -3,22%. Kemudian, tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 4,68%. Namun, tahun 2022, rasio pertumbuhan Pendapatan kembali mengalami penurunan menjadi -2,75%.

Di sisi lain, pertumbuhan Belanja Pemerintah mengalami peningkatan setiap tahun anggaran. Tahun 2020, pertumbuhan Belanja mencapai -4,57%. Kemudian, tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 2,35%. Tahun 2022, pertumbuhan Belanja meningkat menjadi 3,11%.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai hasil dari analisis data sebelumnya, dapat disimpulkan yaitu :

1. Selama periode 2019 hingga 2022, tingkat rasio kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori rendah, dengan rata-rata sebesar 46,58%. Hal ini menggambarkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masih mempunyai tingkat ketergantungan yang signifikan terhadap Bantuan Pemerintah Pusat.
2. Rasio efisiensi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2022 tergolong dalam kategori kurang efisien dengan persentase di bawah seratus, yaitu sebesar 99,49%. Persentase tingkat pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana yang lebih besar dalam Upaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai hasil yang diharapkan. Hal

ini juga mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum optimal dalam hal efisiensi.

3. Rasio efektivitas keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019 hingga 2022 masih termasuk dalam kategori efektif dengan persentase di atas seratus, yaitu sebesar 104,47%. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara efektif berhasil merealisasikan sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan Kriteria Penilaian Efektivitas yang ditetapkan.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2019–2022 dapat dikategorikan sebagai kurang baik berdasarkan perhitungan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah. Ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,75% pada tahun 2020 dan penurunan sebesar 2,75% pada tahun 2022.

Saran

Sebagai hasil dari analisis data di atas, ada beberapa rekomendasi yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pertama, harus mempertahankan tingkat efektivitas dalam merealisasikan sumber-sumber pendapatan daerah. Kedua, harus berusaha meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi biaya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penerimaan daerah lebih besar dari target yang ditetapkan. Meskipun bantuan dana dari Pemerintah Pusat tetap penting, untuk mencapai hal ini, optimalisasi perolehan PAD harus dilakukan dengan mengeksplorasi sumber penerimaan baru di daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- Maulina, F., & Rhea, R. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Obis*, 2(1), 11-22.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 1(1), 51-65.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147-153.

- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Eka Cida, 1(1).
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, 7(1).
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Halim, A. (2001). Bunga rampai: Manajemen keuangan daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim dan Abdul. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Salemba: Jakarta.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.